

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kemiskinan

1. Pengertian kemiskinan

Menurut Kuncoro (1997), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Adapun menurut Kartasmita (1997) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.¹

Beberapa definisi diatas menurut para ahli, maka dapat disimpulkan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi individu, kelompok, keluarga dan masyarakat yang tidak dapat memenuhi standar hidup minimumnya, seperti papan, sandang dan pangan. Terlebih pendidikan dan kesehatan. Biasanya hal ini terjadi karena adanya pengangguran yang dialami oleh individu atau kelompok suatu keluarga. Adapun beberapa ciri-ciri kemiskinan yaitu sebagai berikut :

¹ Rustanto Bambang. *“Mengenai Kemiskinan”* (Bandung : PT Remaja Rosdakara, 2015) Cetakan Ke-1 h.1

- a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
- b. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan tidak adanya kemampuan untuk berwirausaha sendiri.
- c. Minimnya pendidikan yang mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan karena tidak mempunyai ijazah sebagai dasar untuk melamar pekerjaan.
- d. Sumber daya manusia yang rendah.
- e. Terkena bencana alam
- f. Sakit, cacat fisik ataupun mental.

Penyebab kemiskinan tentunya sangat beragam, adapun terdapat bentuk-bentuk kemiskinan sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan yaitu sebagai berikut :

- a. Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural bisa disebut sebagai kemiskinan turunan, jika seorang lahir dari keluarga miskin kemungkinan besar ia pun akan ikut mengalami kemiskinan karena dari awal keluarganya sudah dalam keadaan miskin.

b. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup manusia itu sendiri, lingkungan sekitar yang selalu merasa tidak berkecukupan, malas dalam bekerja, tidak disiplin dan tidak ada kemauan untuk merubahnya.

c. Kemiskinan Struktural.

Rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi pada suatu system sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukungnya penanggulangan kemiskinan, tetapi menyebabkan kemiskinan semakin meningkat seperti halnya kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi asset produksi tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung mengutamakan kelompok masyarakat tertentu.²

² Khomsan Ali, Dkk., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta : Fakultas Ekologi Manusia IPB Bekerja Sama Dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2015) h.3

2. Indikator Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan sesuatu yang dapat diukur sehingga muncul istilah “Garis Kemiskinan” (Sajogjo, 1973). Indonesia kebutuhan dasar ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) yang disusun menurut daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang terdiri dari pangan (makanan) karena dianggap sebagai kebutuhan yang harus selalu terpenuhi kebutuhannya setiap hari demi kelangsungan hidup, karena itu saat ini ada beberapa bantuan dari pemerintah yang memberikan beras sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Manusia bukan hanya membutuhkan makanan tetapi membutuhkan pula air yang dikonsumsi setiap hari dan segala aktifitas rumah tangga seperti memasak, mencuci, mandi dan lainnya membutuhkan air. Sekarang ini sudah banyak disalurkan air bersih terutama ke daerah-daerah terpencil.³

Garis kemiskinan di Indonesia dihitung dengan pengeluaran minimum makanan dan minuman tiap bulan harus

³ Rustanto Bambang, *Menangani Kemiskinan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015) h. 125

mencapai 2.100 kilo kalori per kapitanya. Ditambah dengan pengeluaran diluar dari makan dan minum seperti rumah, sandang, kesehatan, pendidikan, alat transportasi dan yang lainnya, biaya yang dikeluarkan untuk membeli 2.100 kilo kalori perharinya disebut garis kemiskinan makanan, sedangkan biaya membayar kebutuhan selain makan dan minum adalah Garis kemiskinan non-makanan. Jadi, kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dibawah 2.100 kilo kalori perkapita. Maka penduduk yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan disebut sebagai penduduk miskin.⁴

Indikator kemiskinan internasional menurut bank dunia ialah keterbatasannya memiliki tanah dan modal, terbatasnya sarana dan prasana yang tersedia, ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja, pelayanan kesehatan yang layak untuk masyarakat, sumber daya manusia, lingkungan dan budaya hidup yang kurang baik, tata pemerintah yang buruk, pengelolaan

⁴ Rustanto Bambang, *Menangani Kemiskinan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015) h.126

sumber daya alam yang berlebihan tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan kedepannya. Kemiskinan menurut Bank Dunia pula dapat diartikan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1,00 per harinya. Konteks kemiskinan internasional ini diukur dari indeks pembangunan manusia yang bebrupa akumulasi dari indeks usia harapan hidup, indeks pendidikan dan kesehatan serta indeks per kapita.

Adapun cara menghitung kemiskinan adalah sebagai berikut :

- a. Membandingkan jenis kemiskinan dari beberapa Negara.
- b. Garis kemiskinan tersebut untuk menghitung jumlah kemiskinan di dalam Negara.
- c. Menggunakan estimasi kemiskinan dan menyusun dengan melihat langsung pengalaman kemiskinan dari kaum miskin.

3. Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Hakikat kemiskinan menurut Al-Qur'an mempunyai keterkaitan dengan tiga hal ini, yaitu hubungan antara manusia dengan harta benda, pengertian fakir dan miskin,

kemiskinan antara tindakan manusia dan sunah. Tiga keterkaitan tersebut Dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hubungan antara manusia dengan harta benda

Harta benda yang ada di muka bumi ini sesungguhnya ialah hanya milik Allah SWT, kita sebagai khalifah dimuka bumi ini hanya diberikan titipan oleh Allah untuk memanfaatkan dan menjaga segala yang ada di muka bumi. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 29, al-Ma'idah ayat 17, yang artinya sebagai berikut :

Surat Al-Baqarah : 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
 فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu”. (QS. Al-Baqarah:29)⁵

Surat Al-Ma'idah: 17

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2007).

“Kepunyaan Allah lah kerjaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya”. (QS. Al-Ma’idah:17)⁶

Allah menciptakan langit dan bumi memang diperuntukan untuk manusia yang ada dimuka bumi ini. Tetapi bukan berarti seorang manusia mengambil yang bukan haknya. Harta merupakan titipan Allah sebagai perhiasan di dunia dijadikan sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah dan dimanfaatkan sebagai mana mestinya bukan untuk merusaknya, harta benda juga bisa sebagai ujian kedalam iman seseorang jika terlalu cinta kepada hartanya membuat ia merasa sombong, serakah, serta lupa untuk mengingat Allah dan juga sebagai nikmat yang harus disyukuri.

b. Pengertian fakir dan miskin

Dalam menerangkan tentang kemiskinan al-Qur’an sering menggunakan kata fakir dan miskin serta berbagai bentuk dari keduanya. Kata *fakir* (bentuk *mufrad*), *fuqara*

⁶ Depertemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2007).

(bantuk *jama'*), *faqr* (bentuk mashdar) terdapat pada al-Qur'an dengan berbagai arti. Antara lain sebagai berikut :

At-Taubah ayat 60 didalam ayat tersebut *fuqara* adalah kelompok yang berhak menerima zakat :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (QS. At-Taubah:60)⁷

Berdasarkan ayat diatas, orang fakir dan orang miskin termasuk kedalam golongan yang sama yang harus diberikan zakat untuk mengentaskan kemiskinan mereka.

⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2007).

c. Kemiskinan antara tindakan manusia dan sunah

Qs. Ar-ra'd ayat 26, yang artinya sebagai berikut :

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

“Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang dia kehendaki”. (QS. Ar-Ra'd:26).⁸

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah meluaskan rezeki bagi makhluk yang ia kehendaki dan mempersempit bagi yang ia kehendaki pula. Ialah yang maha mengetahui kemaslahatan untuk seseorang, siapa yang pantas untuk diluaskan rezekinya dan siapa yang disempitkan rezekinya. Semuanya tergantung dari usaha kita masing-masing sebagai manusia, jika berkerja dengan niat karna Allah serta beribadah kepada Allah maka rezeki yang didapat pun atas izin Allah SWT. Dengan demikian kemiskinan dapat dikaitkan dengan dua hal yaitu : kemiskinan ditentukan oleh usaha dan potensi kita sebagai manusia dan kemiskinan

⁸ Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2007).

merupakan sebab dan akibat dari keberadaan Sunatullah yang berupa hukum kausalitas.⁹

Adapun kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam serta bagaimana cara penanggulangannya. Kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam dan penanggulangannya. Jika suatu wilayah yang kita tempati dengan kondisi alam yang sudah tidak berpotensi untuk mendapatkan rezeki, maka seseorang boleh saja melakukan cara dengan berpindah tempat tinggal (hijrah) dengan tujuan untuk mencari kehidupan dan penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya, dengan berhijrah berarti bukan hanya mendapatkan pahala untuk diakhirat saja, tetapi bisa mendatangkan rizki atas ridho Allah SWT.

Sesuai dengan ayat al-Qur'an surat an-Nisa ayat 100 yang artinya :

⁹ Shidqi Ahyani, *Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Solusinya Dalam Pandangan Islam* (Jurnal : Ekonomi Islam, Vol.04 No.01 Tahun 2016) H. 46-51

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَآغَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً وَلِمَنْ
يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju) maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (QS. An-Nisa:100)¹⁰

4. Program Penanggulangan Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan sudah ada sejak masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudiyono yang di koordinasikan oleh Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) program penanggulangan kemiskinan pada pemerintahan ini terdapat tiga program, yaitu program berbasis bantuan sosial, program berbasis pemberdayaan masyarakat, dan program berbasis usaha mikro.¹¹

¹⁰ Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2007).

¹¹ Rustanto Bambang, *“Menangani Kemiskinan”* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015) h. 116

a. Program Berbasis Bantuan Sosial

Bantuan ini meliputi pangan, pendidikan, papan, sanitas atau kesehatan, pengawasan lingkungan dan air bersih yang disalurkan kemasyarakat terutama di daerah terpencil yang masih sulit untuk mendapatkan air bersih untuk kegiatan rumah tangga sehari-hari, bantuan ini bersifat bantuan langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Jenis bantuan lainnya Jamkesmas atau sekarang lebih dikenal dengan BPS Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan beras rumah tangga miskin (Raskin), bantuan siswa miskin (BSM) yang dialurkan lewat sekolah yang diberikan untuk siswa yang tidak mampu dan rumah tidak layak huni (RTLH).

b. Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Program ini adalah program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri, baik berada di perkotaan ataupun dipedesaan yang terbagi menjadi tiga bagian :

- a) Program infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih terutama di daerah pedesaan.
- b) Program ekonomi, pembangunan ekonomi produktif, simpan pinjam.
- c) Program sosial, kesehatan, gizi anak dan pendidikan.

c. Program Berbasis Usaha Kecil Mikro

Memberikan modal usaha bagi pengusaha kecil, memberikan pelatihan khusus kepada pengusaha untuk meningkatkan keterampilan, memperluas produksi dan pemasaran hasil produksi rumah tangga dan industri kecil dengan pemberian kredit usaha rakyat (KUR).

Dilanjut pada pemerintahan Jokowi, program penanggulangan kemiskinan pada masa ini melanjutkan dari pemerintahan sebelumnya yaitu SBY. Ditambah dengan tiga program baru dengan jangkauan yang lebih luas lagi kepada rumah tangga sangat miskin yaitu, KIS, KIP dan PSKS.

a. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Sebelumnya bantuan ini lebih dikenal dengan Jamkesmas, yang kemudian diperluas kembali untuk rumah tangga sangat miskin agar semuanya dapat terkover.

b. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Bantuan ini diberikan kepada anak-anak yang sedang menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan sampai dengan perguruan tinggi.

c. Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)

Program ini berupa tabungan atau simpanan yang diberikan langsung tunai.

Selanjutnya adalah program kementerian sosial melalui Undang-undang No.13 tahun 2014 tentang penanganan kemiskinan fakir-miskin. Maka kementerian sosial membuat program yang lebih spesifik yang terkait dengan masalah keterlantaran, kemiskinan, bencana, dan kecacatan yang kenal sudah dapat dirasakan manfaatnya bagi

masyarakat rumah tangga miskin. Program-program tersebut adalah :

- a. Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- c. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
- d. Program Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
- e. Program Asistensi Orang Dengan Kecacatan (Asodk)
- f. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT)

B. Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia, terlebih PKH juga lebih dimaksudkan sebagai upaya pembangunan system perlindungan sosial penduduk miskin dan diharapkan bisa memutus rantai kemiskinan yang sudah terjadi selama ini. Sebagai sebuah program bantuan bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk

menfaatkan layanan fasilitas kesehatan (faskes) dan pendidikan (fasdik) yang ada disekitar mereka. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan pada ibu hamil harus rutin memeriksakan kandungan ke posyandu terdekat maksimal satu kali dalam satu bulan, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Kewajiban PKM di bidang pendidikan adalah mendaftarkan serta memastikan anak-anak menempuh pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA.¹² Pemanfaatan PKH juga dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan minimal usianya 60 tahun dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Keluarga penerima manfaat (KPM) didorong untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, dan pendampingan. PKH diarahkan untuk menjadi salah satu program unggulan agar dapat menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan kemiskinan di Indonesia.

¹² Pedoman pelaksanaan PKH 2019,

2. Indikator Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

- a. Indikator kesehatan
 - a) Ibu hamil, maksimal 2 kali kehamilan.
 - b) Anak usia 0 sampai dengan 6 tahun.
- b. Indikator pendidikan
 - a) Anak Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat.
 - b) Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat.
 - c) Anak Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah (MA) atau sederajat, anak usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- c. Indikator kesejahteraan sosial
 - a) Lanjut usia mulai dari 60 tahun ke atas, maksimal 1 orang yang berada dalam 1 keluarga.

- b) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.¹³

3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan sebagai bagian dari upaya pemerintah yang diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia, dengan pemberian bantuan tunai beryarat. Dalam jangka pendek PKH diharapkan dapat membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban kebutuhan dan pengeluarannya. Pada jangka menengah PKH diharapkan menciptakan suatu perubahan perilaku KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang ada agar dimanfaatkan sebagaimana mestinya supaya dapat menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Sedangkan dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.¹⁴

¹³<https://Pkh.Kemensos.Go.Id/Dokumen/DOCS20200629111004.Pdf>
“Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2020. Diakses Pada April 2020

¹⁴<https://Pkh.Kemensos.Go.Id/Dokumen/DOCS20200629111004.Pdf>
“Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2020. Diakses Pada April 2020

Adapun tujuan khusus meliputi :

- a. Meningkatkan taraf hidup penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Mencipakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi miskin dan kesenjangan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

4. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

- a. Hak KPM PKH
 - 1) Bantuan sosial, setiap KPM mendapatkan bantuan tergantung kategori kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial.

- 2) Pendampingan sosial yang diberikan oleh setiap pendamping PKH.
- 3) Pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.
- 4) Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementer dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.

b. Kewajiban KPM PKH

Agar mendapatkan bantuan tunai, peserta diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan kesehatan, pendidikan anak, dan kesejahteraan sosial. Kewajiban KPM PKH terdiri dari:

1) Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan protocol kesehatan dibawah ini :

Ibu Hamil Dan Nifas:

- a) Selama masa kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan pada fasilitas

kesahatan posyandu atau yang lainnya setiap bulan.

- b) Ibu hamil harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
- c) Setelah melahirkan, ibu nifas harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan pelayanan KB pasca melahirkan setidaknya 3 kali pada minggu I, IV, dan VI.

Anak Usia 0-6 Tahun :

- a) Anak pada usia 0-28 hari harus diperiksa kesehatannya maksimal 3 kali pada posyandu terdekat atau fasilitas kesehatan lainnya.
- b) Anak pada usia 1-9 bulan harus melakukan imunisasi lengkap (BCG, DPT, Hepatitis B, Campak dan Polio) dan ditimbang berat badannya secara rutin maksimal 1 bulan sekali.
- c) Anak pada usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamamin A sebanyak 2 kali dalam setahun,

biasanya pada bulan Februari dan Bulan Agustus tiap tahunnya.

- d) Anak pada usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk mengetahui berat bandannya dan tumbuh sesuai dengan usianya, serta mengikuti kelas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jika menyediakan.

2) *Pendidikan*

Setiap KPM PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pendidikan, anak yang menumpuh pendidikan diwajibkan memenuhi absensi sekolah minimal 85% dalam kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun pelajaran. Adapun beberapa catatan sebagai berikut :

- a) Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 7-16 tahun atau usia sekolah, maka anak tersebut harus sudah terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMLB).

- b) Apabila anak tersebut mengalami buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) terdekat.
- c) Jika anak tersebut masih masuk kedalam usia sekolah, tetapi memilih untuk bekerja maka anak tersebut harus di daftarkan dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kecamatan/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.

3) Lansia Usia 60 Tahun keatas

KPM PKH yang termasuk kedalam kategori lanjut usia harus memenuhi kewajiban Memeriksa kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia, jika memang tersedia.

4) *Penyandang Disabilitas Berat*

- a) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan.
- b) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas kesehatan melalui kunjungan rumah.¹⁵

5. Besara Bantuan

Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda, besaran bantuannya mengikuti scenario bantuan dibawah ini :

Tabel 2.1

Besaran Bantuan Komponen PKH

NO	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp)
1	Ibu hamil	Rp. 2.400.000,-
2	Anak usia dini	Rp. 2.400.000,-
3	SD	Rp. 900.000,-
4	SMP	Rp. 1.500.000,-
5	SMA	Rp. 2.000.000,-
6	Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000,-
7	Lanjut Usia	Rp. 2.400.000,-

Sumber : Keputusan Dinas Sosial RI

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran setiap komponen berbeda. Maksimal dari satu keluarga mendapatkan 4 komponen penerima, jika di dalam satu keluarga tersebut terdapat lebih dari 4 komponen maka bantuan yang diberikan

¹⁵ <https://Pkh.Kemensos.Go.Id/Dokumen/DOCS20200629111004.Pdf> "Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2020. Diakses Pada April 2020

adalah bantuan yang nominalnya paling besar. Bantuan tersebut dilakukan dalam dua sampai empat tahap dalam setiap tahunnya yang dijadwalkan pada bulan Maret, Juni, September, November hal ini mengikuti peraturan pemerintah pusat.

Jadwal pencairan dana tersebut tiap kecamatan ataupun kabupaten berbeda, tergantung keputusan dari Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) setelah berkoordinasi dengan lembaga pencairan. Dana bantuan tunai tersebut langsung dibayarkan kepada peserta PKH melalui rekening masing-masing yang sebelumnya telah diberikan oleh unit bank yang bekerja sama. Pengurus atau pendamping PKH harus memastikan saat pencairan uang tersebut apakah sesuai antara Kartu Peserta PKH atau sesuai dengan rekening dan ATM yang diberikan dengan Kartu Identitas Penduduk (KTP). KPM harus menerima jumlah uang sesuai dengan yang tertera pada slip penarikan setiap PKM juga wajib menjalankan kewajibannya selaku peserta PKH.

C. Demografi Desa Buniayu

Desa Buniayu merupakan desa yang berada di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, yang terdiri dari 17 RT dan 4 RW dalam satu desa. Seluruh penduduk desa beraga Islam dengan mata pencaharian rata-rata sebagai buruh dan petani. Berikut ini merupakan jumlah penduduk Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang¹⁶ :

Tabel. 2.2

Jumlah penduduk Desa Buniayu

Jumlah penduduk berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Kartu Keluarga (KK)
4.472	1.200

Sumber : Desa Buniayu

Adapun letak geografi desa buniayu sebagai berikut :

- a) Sebelah utara : Desa Benda dan Desa Merak
- b) Sebelah selatan : Desa Bedeng dan Desa Rancailat
- c) Sebelah barat : Desa Jambu dan Desa Daon
- d) Sebelah timur : Desa Kamuning dan Kaliasin

¹⁶ Sumber Desa Buniayu 2020

Sedangkan masyarakat yang mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan sebanyak 423 jika di hitung menurut Kartu Keluarga . dari sejak adanya PKH di Desa Buniayu pada 2016 KPM PKH setiap tahunnya bertambah hingga tahun 2020 kemarin. Penerima PKH sudah sesuai dengan Indikator penerima dan rutin diberikan pendampingan oleh pendamping di Desa Buniayu.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan sebelumnya sudah ada yang meneliti untuk mengetahui bagaimana progress dan perkembangan dari program tersebut. Adapun terdapat dua penelitian yang dipilih sebagai bahan analisis perbandingan bagi peneliti dengan judul penelitian Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. *Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo 2017*

Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan kuantitatif. Hasil dari tanggapan masyarakat atau responden setelah menyebarkan kuesioner tentang PKH ini ialah mayoritas menyatakan program PKH ini sangat bagus dengan persentase sebesar 72% sedangkan yang menyatakan bagus sebesar 23% dan yang menyatakan tidak bagus sebesar 5% serta yang menyatakan sangat tidak bagus sebesar 0%.¹⁷

Program ini di nilai sangat positif oleh masyarakat sekitar karena banyak manfaat yang bisa dirasakan seperti bantuan tunai dan nontunai. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau angkat kepada responden penerima manfaat, maka penelitian yang dibahas oleh Mohammad Rizal memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

¹⁷ Mohammad Rizal, *“Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo 2017”* (Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)

2. *Implementasi program keluarga harapan (PKH) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin*

Yudid B.S.Tlonaen, Willy Tri Hardianto, Carnia Diahloka dalam jurnalnya mengemukakan bahwa program keluarga harapan ini di kecamatan Lowokwuru sebagai tempat studi kasusnya yang di tunjukan kepada masyarakat miskin khususnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun data yang dijadikan sebagai penerima bantuan program keluarga harapan di nilai dari kehidupannya sehari-hari. pendamping PKH rutin mengadakan pertemuan dengan para masyarakat yang menerima bantuan tersebut untuk memutahirkan data peserta PKH secara berkala. Diadakannya pertemuan rutin ini untuk mengetahui bagaimana kondisi di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya masyarakat merespon dengan positif program PKH tersebut. Masyarakat menilai sangat terbantu dengan adanya bantuan PKH ini untuk membantu

mencukupi kebutuhan sehari hari dan di bidang pendidikan anak yang masih dalam usia sekolah.¹⁸

Pada penelitian ini memiliki persamaan tentang kesejahteraan masyarakat dan pendidikan yang ditempuh untuk anak usia sekolah.

3. *Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.*

Winda Jayanti mahasiswa Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Sumatra utara, 2018. Hasil dari penelitian ini setelah menyebarkan kuesioner ke-60 responden seluruh warga miskin yang menerima bantuan PKH di desa tersebut dipilih usia terbanyak mulai dari 35-45 tahun sebanyak 32 responden, usia 42-48 sebanyak 21 responden, usia 28-34 sebanyak 6 responden 63-60 tahun sebanyak 1 responden. Hasil observasi yang di dapat bahwa program PKH di desa tersebut sangat mempunyai

¹⁸ Yudid B.Stlonaen, Willy Tri Hardianton, Carnia Diahloka, "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin". (Jurnal Ilmu Dan Ilmu Politik, Vol. 3 No. 01. 2014)

pengaruh yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini didapat dari pernyataan atau pendapat keluarga penerima manfaat setelah menyebarkan kuesioner tersebut.¹⁹

4. *Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Peserta PKH Kp. Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan.*

Di teliti oleh Kartiawati mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. Setelah menyebarkan angket kepada 70 responden dengan 20 pertanyaan dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan penerima manfaat PKH ibu rumah tangga sebanyak 3 responden dengan persentasi 4%, petani sebanyak 62 responden dengan presentasi 88%, pedagang sebanyak 5 responden dengan presentase 7% dan buruh sebanyak 0 dengan persentase

¹⁹ Winda Jayanti, Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa X Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, (Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2018)

0%. Sedangkan tingkat pendidikan responden tidak tamat SD sebanyak 13 responden dengan persentasi 18,5%, lulus SD sederajat sebanyak 41 responden dengan persentase 58,5%, lulus SMP sederajat sebanyak 16 responden dengan presentase 23% dan lulus SMA sederajat sebanyak 0 responden dengan persentase 0%. Adapun beberapa pertanyaan yang telah peneliti berikan kepada 70 responden :

Apakah ibu mendapatkan informasi mengenai PKH dari petugas PKH/pejabat desa jawaban tersebut YA sebanyak 70 responden dengan persentase 100%. Apakah ibu mendapat pendampingan yang baik dari pendamping PKH jawaban tersebut YA sebanyak 70 responden dengan persentase 100%. Apakah ibu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan jawaban dari responden YA sebanyak 70 responden dengan persentase 100%. Apakah dana PKH yang diterima sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan jawaban YA sebanyak 70 responden dengan presentasi 100%. Apakah dana yang

ibu terima ibu gunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan bagi lansia dan disabilitas berat jawaban YA sebanyak 70 responden dengan persentase 100%. Apakah dana yang ibu terima ibu gunakan untuk kebutuhan lain selain pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan bagi lansia dan disabilitas berat jawaban YA sebanyak 30 dan jawaban TIDAK sebanyak 40 responden dengan persentase sebanyak $43\%+57\%=100\%$.²⁰

5. *Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peserta Program Ke Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2021.*

Teguh Setiadi, mahasiswa Universitas Galuh Ciamis Jawa Barat. Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi PKH di kelurahan kertasari memperoleh skor rata-rata 204,38 yang termasuk pada kategori cukup,

²⁰ Kartiawati, Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Isnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

kesejahteraan peserta program memperoleh 174,22 yang termasuk dalam kategori sangat kuat dengan nilai koefisien determinasi sebesar 95,65% artinya implementasi PKH mempunyai pengaruh sangat kuat sebesar 95,65% terhadap kesejahteraan peserta, sedangkan 4,35% adalah faktor lainnya.²¹

E. Hubungan Antar Variabel

Variabel X pada penelitian ini Program Keluarga Harapan (PKH) yang diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang meskipun tidak 100% setidaknya masyarakat masuk kedalam kategori sejahtera, mendapatkan fasilitas kesehatan yang terjangkau, pendidikan anak yang menumpuh hingga ke jenjang pendidikan yang tinggi. Sedangkan variabel Y penanggulangan kemiskinan di Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang diharapkan kemiskinan ini dapat ditanggulangi lewat program PKH tersebut, karena di

²¹ Teguh Setiadi, Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peserta Program Di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis 2012 (Skripsi : Universitas Galuh,2012)

Desa ini masih banyak keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan langsung serta pendampingan yang khusus untuk keluar dari zona kemiskinan.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan sebuah peramalan mengenai penelitian yang akan kita lakukan atau disebut jawaban sementara yang tingkat kebenarannya perlu di uji terlebih dahulu.²² Jawaban sementara belum tentu kebenarannya dan tidak bisa dikatakan sempurna harus di uji terlebih dahulu dengan menggunakan data yang dikumpulkan baik berupa data sekunder maupun primer. Hipotesis memiliki *statement* yang menyatakan apakah adanya hubungan antara variabel (X) dengan variabel (Y).

Hipotesis dalam penelitian ini berarti menduga bahwa suatu variabel mempunyai hubungan dengan variabel lain baik secara parsial maupun secara simultan, maka hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

²² M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, jilid Kedua (Jakarta: Kencana, 2017), h.85

H_0 : Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terdapat pengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

H_a : Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat pengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

Dalam penelitian ini terdapat dua jawaban sementara yang pada hipotesis ini program keluarga harapan terdapat pengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya dan tidak terdapatnya pengaruh program keluarga harapan pada penelitian ini.

